

Untuk selanjutnya pelaksanaan KBP diharapkan dapat menjadi terlembaga dan menjadi model untuk pengkajian terhadap kondisi masyarakat sebagai dasar penyusunan strategi, kebijakan maupun program-program pembangunan.

Komunitas Belajar Perkotaan mengkomodir berbagai unsur pelaku pembangunan, yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), swasta dan masyarakat. Dari masyarakat unsur yang harus dilibatkan dalam forum terdiri dari kelompok masyarakat miskin, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi non pemerintah dan akademisi (perguruan tinggi). Pemerintah daerah terdiri dari eksekutif dan legislatif. Eksekutif terdiri dari dinas, badan, dan lembaga daerah yang mempunyai program penanggulangan kemiskinan.

Salah satu tugas pokok KBP adalah bersama dan mendorong TKPK-D menyusun atau mereview Strategi Penanggulangan Kemiskinan-Daerah (SPK-D) dan mengimplementasikannya. Proses penyusunan SPK-D menggunakan prinsip-prinsip: bottom-up,

partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan manfaat bersama. Sementara, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan antara lain adalah:

- melakukan kajian bersama terhadap masalah kemiskinan,
- mengkaji ulang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,
- merumuskan strategi, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,
- merumuskan mekanisme pemantauan dan evaluasi,
- pendokumentasian,
- kegiatan lain, seperti riset kebijakan.